



Swasta Boleh Bisnis Parkir di Malioboro

■ Dishub DIY Sulit Sediakan Kantong Parkir Baru

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY memberi lampu hijau kepada pihak swasta yang ingin mengembangkan bisnis lahan parkir di kawasan Malioboro. Hal ini menyusul wacana pembongkaran Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) yang akan diubah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada 2025.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan, meski dapat lampu hijau, pengusaha tetap perlu mengurus perizinan sebelum mendirikan tempat parkir. Adapun regulasi mengenai tempat parkir dan tarif parkir telah diatur dalam Perda Kota Yogya No 2/2019 tentang Perparkiran dan Perda Kota Yogya No 1/2020 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

"Jadi tidak bisa sembarangan juga semuanya itu dijadikan tempat parkir kan juga nggak bisa. Jadi dari sisi tata kota tata ruangnya seperti apa, memungkinkan tidak. Semuanya kan harus berizin," terang Made, Kamis (3/8).

Menurut Made, selain tempat khusus parkir yang disediakan swasta, penyediaan tempat parkir bekerja sama dengan beberapa hotel di Kawasan Malioboro dirasa juga dapat menjadi opsi. "Kalau parkir-parkir komunal itu kan bisa jadi pinggir-pinggir Malioboro itu kan banyak hotel, hotel-hotel itu kerja sama kan bisa," tuturnya.

Menurutnya, Taman Parkir ABA saat ini berdiri di atas tanah kasultanan atau Sultan Ground dan izin pemanfaatannya akan habis pada 2025. Oleh karenanya, di tahun tersebut taman parkir akan dialihfungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

JADI RTH

- Pemda DIY izinkan pihak swasta membuka bisnis lahan parkir di kawasan Malioboro.
- Pemda DIY berencana membongkar Taman Parkir Abu Bakar Ali (ABA) menjadi RTH 2025.
- Pengusaha tetap perlu mengurus perizinan sebelum mendirikan tempat parkir.
- Dishub DIY beralasan, sulit untuk mencari kantong parkir baru di kawasan premium.

"Itu kan tanah keraton kami harus kembalikan ke keraton kan ada kekancingan. Kedua, memang secara dossier itu tidak lagi dipergunakan sebagai tempat parkir tetapi sebagai ruang terbuka hijau," tuturnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Sumariyoto mengatakan, pihaknya kesulitan untuk menyediakan kantong parkir baru karena keterbatasan lahan. Karenanya, jika ada pihak swasta yang memiliki aset berupa lahan luas di Malioboro, sangat berpeluang dijadikan bisnis tempat parkir.

"Teman-teman sudah sering kali *ngendiko* silakan ada lahan kosong yang tidak dipakai difungsikan sebagai kantong parkir biar dikelola sendiri, ujanmya.

Sementara, aktivitas parkir akan dialihkan ke kantong parkir resmi yang dikelola pemerintah jika Taman Parkir ABA direlokasi. Misalnya tempat parkir di Senopati, Ngabean, Beskalan, dan Ketandan.

Optimalisasi kantong par-

kir diharapkan juga akan menumbuhkan pusat ekonomi baru di Malioboro. Terlebih Sri Sultan menginginkan agar Ketandan dapat menjelma menjadi salah satu pusat perekonomian baru.

"Harapannya ke depan Ketandan menjadi semacam pusat ekonomi juga, kan *Ngarso Dalem* berharap Ketandan jadi pedestrian menjadi *Chinese Town* bernuansa Tionghoa. Jadi menyatu dengan Ketandan," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, sebelumnya mengungkapkan, bangunan Taman Parkir ABA tidak bersifat permanen sehingga dapat dibongkar sewaktu-waktu. Relokasi itu juga menjadi upaya penataan kawasan sumbu filosofi yang kini tengah diajukan menjadi warisan budaya dunia tak benda menurut UNESCO.

"Dari dulu kan ABA konsepsinya *temporary*, dari awal kan sementara maknanya bentuk bangunannya *knockdown* jadi sifatnya sementara," jelas Beny di kantornya.

Beny melanjutkan, relokasi dilakukan jika kondisinya sudah benar-benar siap. Hingga saat ini Pemda DIY masih berupaya mencari tempat parkir alternatif untuk menggantikan Taman Parkir ABA.

Meski demikian, Beny enggan menyebut mana saja lokasi yang dianggap potensial untuk dijadikan kantong parkir. Sebab upaya pencarian masih berjalan. "Itu sudah di-*sounding* beberapa lokasi. Bahkan pak gubernur sudah bilang kalau ada swasta mau membuka, rumahnya nganggur dan besar silahkan saja (membuka tempat parkir)," ungkap Beny. (tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005